

Judul : Impor tekstil ilegal: kawasan berikat beralih fungsi
Tanggal : Minggu, 12 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Impor Tekstil Ilegal

Kawasan Berikat Beralih Fungsi

FOTO: DOC IG PERBAU



Lamhot Sinaga

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga meminta aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait bertindak tegas terhadap maraknya impor tekstil ilegal. Praktik tersebut telah merugikan industri tekstil nasional.

Menurutnya, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ilegal ke wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 28 ribu kontainer setiap tahun. Selain memukul industri nasional, hal itu juga mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor padat karya tersebut.

"Masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal ini sudah menembus titik kritis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kelangsungan hidup industri nasional," kata Lamhot di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dia menegaskan, masuknya barang ilegal itu karena kawasan berikat tidak optimal menjalankan fungsi utamanya. Seharusnya, kawasan berikat berperan sebagai fasilitas pendukung ekspor dan tempat bagi perusahaan memproduksi barang untuk tujuan pasar luar negeri dengan kemudahan fiskal.

Namun pada praktiknya, kawasan berikat justru beralih fungsi menjadi jalur distribusi barang impor ke pasar domestik.

"Fungsi kawasan berikat sudah melenceng jauh. Banyak yang tidak lagi fokus mendukung ekspor, tapi justru jadi pintu masuk bagi produk impor yang akhirnya membanjiri

pasar dalam negeri," katanya.

Dia menilai, pengawasan kawasan berikat harus diperketat dan dievaluasi secara menyeluruh. Termasuk mekanisme pelaporan barang masuk dan keluar. Untuk itu, Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mesti melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan berikat yang diduga menyalahgunakan izin.

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), terang Lamhot, sekitar 60 perusahaan tekstil nasional telah menutup usahanya dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini terjadi akibat tekanan berat dari barang impor ilegal dan kebijakan yang dinilai terlalu longgar terhadap produk luar.

"Salah satu yang terdampak serius adalah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang resmi menghentikan operasionalnya," ucapnya.

Selain itu, dalam kurun dua tahun terakhir sekitar 250 ribu pekerja kehilangan mata pencaharian di sektor TPT. Itu bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan dan jika tidak segera dibenahi, industri tekstil Tanah Air bisa mati perlahan.

Lamhot meminta Pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, serta aparat penegak hukum. Pengawasan di pintu masuk saja tidak cukup tanpa disertai pengawasan berlapis di kawasan berikat dan jalur distribusi dalam negeri.

"Ini tidak bisa ditangani parsial. Harus ada langkah menyeluruh. Termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan oknum yang bermain di balik impor ilegal," katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menambahkan, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai dominasi produk asing. ■ PYB